

R I N G K A S A N

Latar belakang permasalahan dalam tesis ini diawali dengan adanya bangunan Bali Sky Light Restoran yang didirikan nyonya Lindawati dan diduga melanggar Peraturan Daerah tingkat II Gianyar. Atas dugaan pelanggaran tersebut, terhadap nyonya Lindawati diterapkan dua jenis sanksi, yaitu *sanksi administrasi* berupa "perintah bongkar Paksa bangunan" dan *sanksi Pidana* "dakwaan Pasal 216 KUHP dan Perda No. 8 tahun 1983.

Proses selanjutnya, ternyata terdapat kontradiksi putusan peradilan TUN disatu sisi dan Peradilan Umum disisi lain. Bahwa Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN menguatkan sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar. Namun oleh Mahkamah Agung putusan itu dibatalkan. Sementara itu, dalam kasus Pidana, Pengadilan Negeri Gianyar menghukum, tetapi Pengadilan Tinggi Bali membatalkan putusan tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuduhan Jaksa.

Dari semua proses penerapan sanksi ini, akhirnya nyonya Lindawati harus menerima keadaan yang tidak adil, yaitu merelakan bangunannya dibongkar paksa oleh aparat Pemda, meskipun dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Masih beruntung Pengadilan Tinggi Bali membebaskannya dari hukuman berupa pidana penjara dan denda.

Atas dasar uraian di atas, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah "apakah dapat diterapkan secara bersama-sama sanksi administrasi dan sanksi pidana seperti yang terjadi dalam kasus Bali Sky Light Restaurant" ?

Pendekatan masalah dalam kajian ini bersifat yuridis normatif dengan tumpuan hukum administrasi dan hukum pidana. Permasalahan dijawab dengan membahas kasus yang terjadi baik dari segi hukum administrasi maupun aspek pidana. Bahan hukum primer yang digunakan, adalah peraturan dan putusan badan-badan peradilan yang memeriksa perkara ini. Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan kepustakaan dan bahan-bahan lain yang menunjang penulisan tesis ini.

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan dalam mengkaji tema sentral dari kajian ini, yaitu "apakah dapat diterapkan secara bersama-sama sanksi administrasi dan sanksi pidana", dapat ditarik kesimpulan : Penegakan hukum melalui penerapan Sanksi Administrasi dalam Pelanggaran Peraturan Daerah dapat melahirkan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala konsekuensi hukumnya. Penerapan sanksi Pidana sehubungan dengan Pasal 216 KUHP perlu dipertimbangkan sehubungan adanya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan hak gugat ke PTUN bagi pihak yang berkepentingan. Penggunaan Sanksi Pidana dalam penegakan Peraturan Daerah hendaknya hanya digunakan sebagai sarana akhir (ultimum remedium).

A B S T R A C T

Name : Jhoni Ginting, S.H.

NIM : 099411773 M

Title : External Cumulation between Administrative Sanction and Criminal Sanction Case Study on "Bali Sky Light Restaurant".

Keywords: - Administrative Sanction
- Criminal Sanction
- Cumulation of Sanction
- Application of Sanction

The legal issues in this Thesis came to my attention because there are conflict between administrative and criminal proceeding that led to a final decision of cumulation sanction.

It is a question to what extend does the application of administrative sanction can be applied together whit criminal sanction.

Approaches used are normative based on case study as follows

- : - first step is discussion of administrative aspect
- second step is discussion of criminal sanction

The research I have done had shown that there are distinguish differences of character between administrative and criminal sanction. Finally, application of two kinds of sanction in this case are unreasonable.